

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengangguran merupakan salah satu permasalahan makroekonomi yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat dan mencerminkan adanya ketidakseimbangan dalam pasar tenaga kerja. Secara umum, pengangguran terjadi ketika jumlah tenaga kerja yang tersedia melebihi kesempatan kerja yang ada, sehingga sebagian angkatan kerja tidak memperoleh pekerjaan. Menurut Sukirno (2010) adalah kondisi di mana individu yang termasuk dalam angkatan kerja dan memiliki keinginan untuk bekerja belum mendapatkan pekerjaan, sementara mereka yang tidak aktif mencari kerja tidak dikategorikan sebagai penganggur. Definisi ini sejalan dengan pandangan Kaufman dan Hotchkiss (1999) yang menyatakan bahwa pengangguran diukur berdasarkan individu yang tidak bekerja tetapi secara aktif mencari pekerjaan dalam periode tertentu. Selain itu, menurut Badan Pusat Statistik (2025) yakni pengangguran mencakup penduduk yang tidak bekerja namun sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha atau telah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja. Keberadaan pengangguran menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam pasar tenaga kerja yang dapat menurunkan produktivitas ekonomi serta menghambat pencapaian tujuan pembangunan suatu negara.

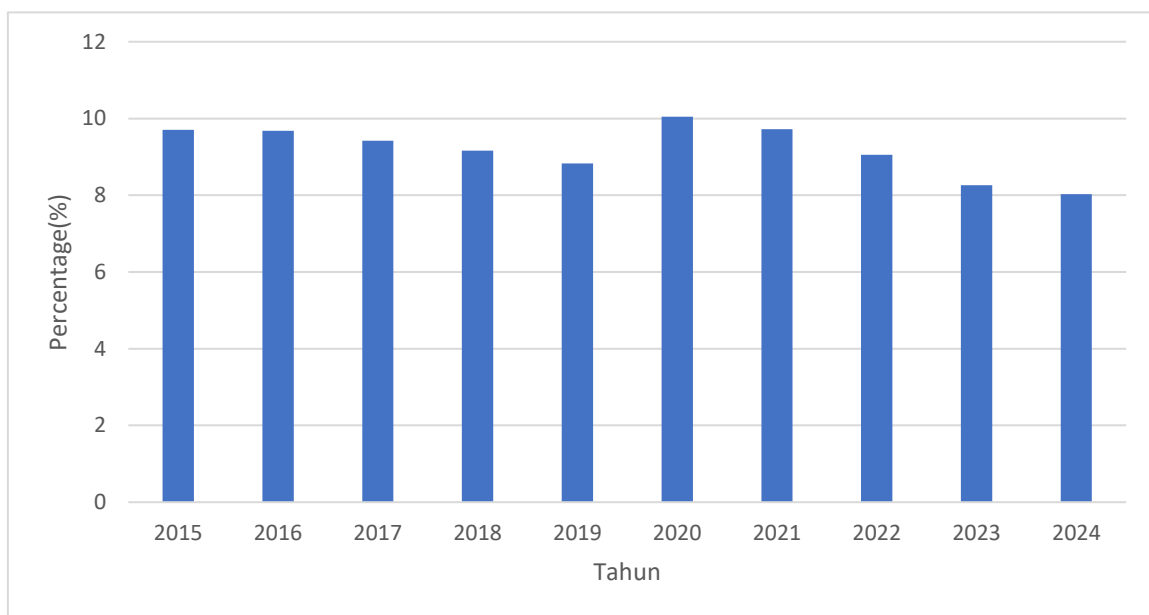
Masalah pengangguran masih menjadi tantangan utama yang dihadapi banyak negara, terutama negara berkembang. Pertumbuhan angkatan kerja yang lebih cepat dibandingkan penciptaan lapangan kerja menyebabkan sebagian tenaga kerja belum terserap dalam kegiatan ekonomi. Kondisi tersebut berdampak pada penurunan

pendapatan masyarakat, meningkatnya kemiskinan, serta berkurangnya produktivitas nasional. Selain dipengaruhi oleh faktor domestik, perkembangan pasar tenaga kerja juga dipengaruhi oleh dinamika ekonomi global, seperti perlambatan pertumbuhan ekonomi, tekanan inflasi, ketidakpastian ekonomi, serta perubahan teknologi yang mendorong perubahan kebutuhan keterampilan tenaga kerja. International Labour Organization (2024) menegaskan bahwa penciptaan lapangan kerja yang produktif dan berkelanjutan masih menjadi tantangan utama di berbagai negara. Perbedaan kondisi ekonomi, struktur pasar tenaga kerja, dan kapasitas pembangunan menyebabkan tingkat pengangguran pada setiap negara berkembang memiliki karakteristik yang berbeda.

Negara-negara yang dipilih dalam penelitian termasuk dalam kelompok *emerging market and developing economies* (EMDEs) yang masih menghadapi permasalahan pembangunan seperti tingginya tingkat informalitas tenaga kerja, kapasitas fiskal yang terbatas, produktivitas yang lebih rendah, serta sistem keuangan yang belum berkembang secara optimal. Kondisi tersebut menyebabkan efektivitas kebijakan fiskal dan moneter menjadi sangat penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Negara-negara dalam kelompok ini juga lebih rentan terhadap guncangan ekonomi global dibandingkan negara maju, sehingga relevan dijadikan objek penelitian mengenai pengaruh kebijakan fiskal dan moneter terhadap tingkat pengangguran (World Bank, 2022).

Perkembangan tingkat pengangguran bisa dilihat pada Gambar 1.1 yakni secara keseluruhan rata-rata tingkat pengangguran di 45 negara berkembang selama tahun 2015-2024 adalah sekitar 9,19 persen. Angka ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi perbaikan dalam beberapa tahun terakhir, tetapi tingkat pengangguran di negara

berkembang masih tergolong relatif tinggi. Sebagaimana hal ini sejalan dengan pandangan Mankiw (2003) yaitu konsep kesempatan kerja penuh mengacu pada kondisi ketika tingkat pengangguran berada di bawah 4 persen dari total angkatan kerja, sehingga bisa di artikan bahwa tingkat pengangguran di 45 negara berkembang masih berada jauh di atas kondisi kesempatan kerja penuh. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penciptaan lapangan kerja di negara berkembang masih menghadapi berbagai tantangan sehingga diperlukan kebijakan ekonomi yang mampu meningkatkan permintaan agregat, investasi, dan penyerapan tenaga kerja. Dua instrumen utama yang digunakan pemerintah untuk mencapai tujuan tersebut adalah kebijakan fiskal dan kebijakan moneter (Pettinger, 2021).



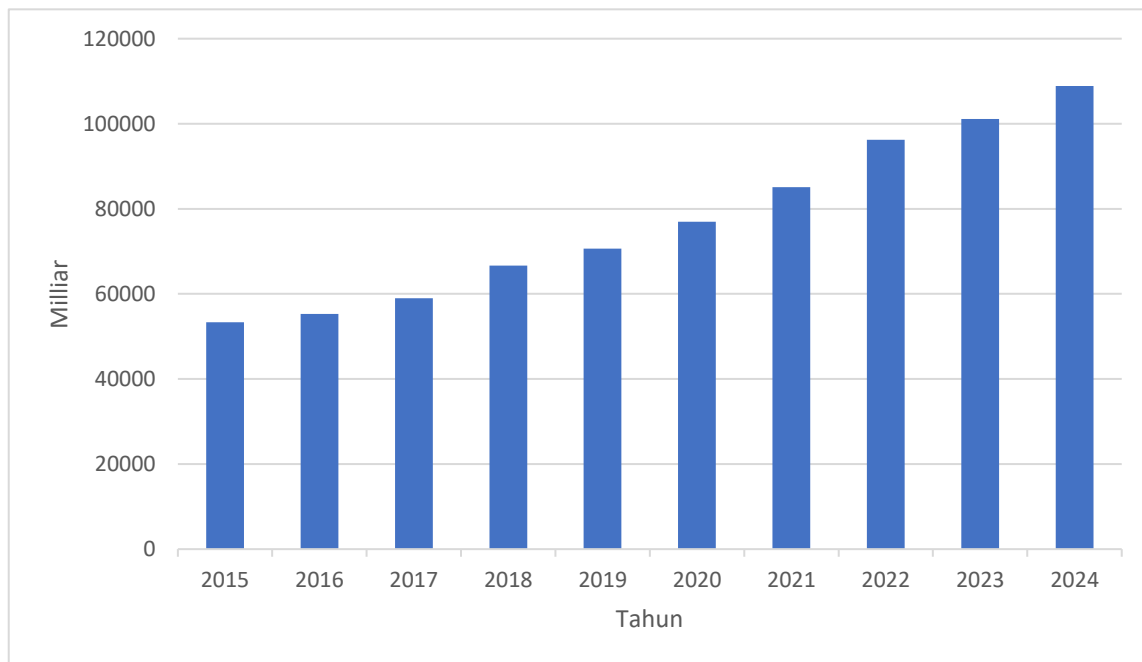
Sumber : International Monetary Fund (2025) (diolah)

Gambar 1. 1 Rata-rata Perkembangan Tingkat Pengangguran di 45 negara Berkembang 2015-2024

Kebijakan fiskal menjadi salah satu instrumen utama yang digunakan pemerintah khususnya di negara berkembang untuk merespon permasalahan pengangguran dan inflasi melalui pengaturan pengeluaran pemerintah dan kebijakan perpajakan. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah memiliki peran dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang meningkatkan permintaan agregat serta memperluas kesempatan kerja (Hartanti et.al. (2024). Hal ini bisa dilihat pada Gambar 1.2 menjelaskan bahwa Rata-rata pengeluaran pemerintah di 45 negara berkembang selama periode 2015-2024 menunjukkan tren yang terus meningkat. rata-rata pengeluaran pemerintah meningkat dari sekitar 77.000 miliar pada tahun 2020 menjadi sekitar 109.000 miliar pada tahun 2024 atau meningkat sekitar 41,6 persen selama lima tahun terakhir. Nilai pengeluaran pemerintah terendah pada periode tersebut terjadi pada tahun 2020, sedangkan tertinggi terjadi pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan bahwa pemerintah di negara berkembang masih mempertahankan belanja publik pada tingkat yang relatif tinggi untuk mendukung pemulihan ekonomi dan pembangunan..

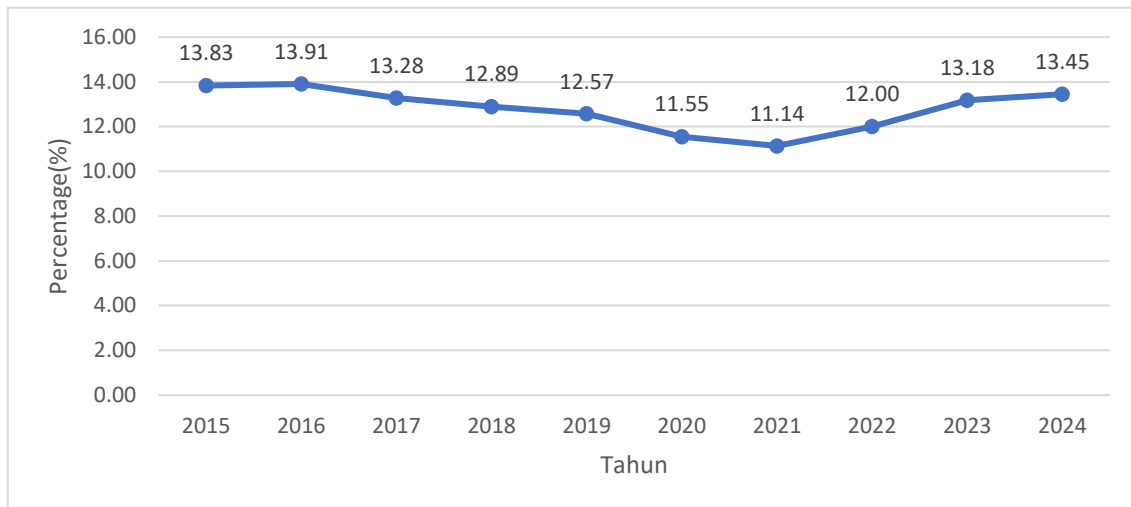
Fenomena tersebut dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19 yang mendorong pemerintah meningkatkan belanja untuk sektor kesehatan, perlindungan sosial, bantuan kepada rumah tangga dan dunia usaha, serta stimulus ekonomi. Setelah pandemi mereda, banyak negara tetap mempertahankan tingkat pengeluaran yang tinggi untuk membiayai pembangunan infrastruktur, transformasi ekonomi, subsidi, serta program perlindungan masyarakat sebagai upaya menjaga pertumbuhan ekonomi di tengah tingginya suku bunga global dan ketidakpastian ekonomi dunia. International Monetary Fund (2024) menjelaskan bahwa empat tahun setelah pandemi, tingkat pengeluaran pemerintah di banyak negara, termasuk negara berkembang, masih berada di atas kondisi sebelum pandemi karena adanya kelanjutan berbagai program

dukungan, kebijakan industri, subsidi, dan meningkatnya tekanan belanja publik. Selain itu, IMF juga menegaskan bahwa negara berkembang masih menghadapi kebutuhan pembiayaan yang besar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga stabilitas fiskal di tengah tingginya biaya pembiayaan dan perlambatan pertumbuhan ekonomi global. Selain kebijakan fiskal, pemerintah juga menggunakan kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas perekonomian. Instrumen moneter seperti suku bunga dan kredit domestik berperan dalam mempengaruhi investasi, konsumsi, serta penciptaan lapangan kerja.



Sumber : *International Monetary Fund (2026) (diolah)*

Gambar 1. 2 Rata-rata Perkembangan Pengeluaran Pemerintah di 45 negara berkembang 2015-2024



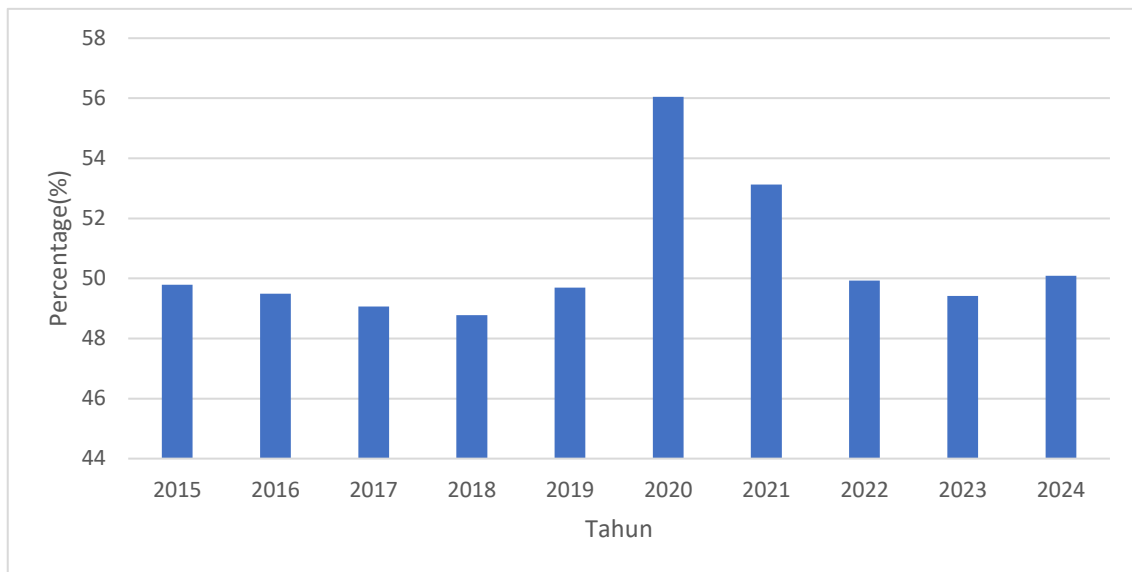
Sumber : *World Bank (2026) (diolah)*

Gambar 1. 3 Rata-rata Perkembangan Suku Bunga Pinjaman di 45 negara berkembang 2015-2024

Gambar 1.3 menunjukkan bahwa kebijakan moneter dari pergerakan suku bunga pinjaman menunjukkan rata-rata suku bunga pinjaman di 45 negara berkembang tercatat sekitar 12,78 persen. Suku bunga pinjaman tertinggi terjadi pada tahun 2016, yaitu sebesar 13,91 persen, sedangkan tingkat terendah terjadi pada tahun 2021, yaitu sebesar 11,14 persen. Hal ini didukung oleh penelitian Bui dan Gábor (2021) yang menyatakan bahwa hubungan antara kebijakan moneter dan kondisi perekonomian bersifat dinamis serta dipengaruhi oleh berbagai guncangan ekonomi. Tekanan eksternal seperti kenaikan suku bunga global, arus keluar modal, dan perlambatan perdagangan internasional, serta faktor domestik seperti inflasi dan keterbatasan ruang kebijakan mempengaruhi arah kebijakan moneter di negara berkembang. Kondisi tersebut menyebabkan otoritas moneter menghadapi dilema antara menjaga stabilitas harga dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Efektivitas kebijakan moneter yang belum

optimal akibat lemahnya transmisi ke sektor riil juga mendorong penerapan kebijakan yang lebih hati-hati dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi (World Bank, 2026). Selain melalui suku bunga pinjaman, kebijakan moneter juga tercermin dari perkembangan kredit domestik yang menunjukkan kemampuan sektor perbankan dalam menyalurkan pembiayaan kepada sektor swasta.

Berdasarkan Gambar 1.4 dibawah juga menunjukkan bahwa rata-rata kredit domestik di 45 negara berkembang selama tahun 2015-2024 tercatat sebesar 50,54 persen dari PDB. Tingkat kredit domestik tertinggi terjadi pada tahun 2020, yaitu sebesar 56,04 persen, sedangkan tingkat terendah terjadi pada tahun 2018, yaitu sebesar 48,78 persen. Perkembangan kredit domestik cenderung relatif stabil pada periode 2015-2019 dengan nilai berada pada kisaran 48-50 persen dari PDB. Perkembangan kredit domestik menunjukkan bahwa sektor keuangan sangat penting dalam menyediakan pembiayaan bagi kegiatan ekonomi. Penelitian Rapih (2021) menjelaskan bahwa perkembangan kredit domestik di negara berkembang dipengaruhi oleh kualitas institusi keuangan, arus modal internasional, dan kondisi perekonomian global. Keterbatasan akses pembiayaan serta tingginya risiko kredit dapat menghambat penyaluran dana kepada sektor produktif. Hambatan tersebut berpotensi menurunkan investasi dan membatasi ekspansi usaha yang diperlukan untuk meningkatkan kapasitas produksi. Perluasan kredit domestik menjadi faktor penting dalam mendukung kegiatan usaha, meningkatkan produktivitas, dan menciptakan kesempatan kerja. Perkembangan kredit domestik yang belum merata antarnegara berkembang menunjukkan bahwa sektor keuangan masih menghadapi berbagai tantangan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.



Sumber : *World Bank (2026) (diolah)*

**Gambar 1. 4 Rata-rata Perkembangan Kredit Domestik di 45 negara berkembang
2015-2024**

Penelitian menambahkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi sebagai variabel kontrol untuk memperoleh hasil estimasi yang lebih akurat mengenai pengaruh kebijakan fiskal dan kebijakan moneter terhadap tingkat pengangguran. Pertumbuhan ekonomi dipilih karena peningkatan aktivitas ekonomi umumnya mendorong produksi dan memperluas kesempatan kerja sehingga dapat menurunkan tingkat pengangguran. Hubungan tersebut sejalan dengan Hukum Okun yang menjelaskan adanya hubungan negatif antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran (Astari et.al, 2019). Temuan empiris juga menunjukkan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi cenderung diikuti oleh penurunan tingkat pengangguran. Inflasi turut digunakan sebagai variabel kontrol karena memiliki hubungan yang erat dengan tingkat pengangguran. Hubungan tersebut dijelaskan dalam Kurva Phillips yang menunjukkan adanya

keterkaitan antara inflasi dan pengangguran dalam jangka pendek (Hafnati & Syahnur, 2018). Perubahan tingkat inflasi dapat mempengaruhi aktivitas produksi dan permintaan tenaga kerja sehingga berdampak pada tingkat pengangguran.

Kebijakan fiskal dan moneter tidak hanya berfungsi sebagai alat stabilisasi ekonomi, tetapi juga memiliki implikasi terhadap dinamika pasar tenaga kerja termasuk tingkat pengangguran. Hal ini dilihat dari berbagai temuan empiris yakni Auntu dan Pilinkiene (2026) menjelaskan bahwa kebijakan fiskal mampu meredam pengangguran dalam jangka pendek, Sedangkan penelitian Hussein (2021) menunjukkan bahwa Kebijakan fiskal di Irak berperan dalam mengelola pendapatan minyak dan menurunkan pengangguran, namun fluktuasi pendapatan minyak menyebabkan ketidakstabilan belanja pemerintah sehingga melemahkan efektivitasnya dalam menstabilkan ekonomi dan mengurangi pengangguran. Ünal (2022) meneliti Kebijakan fiskal kontra-siklus terbukti efektif dalam mengurangi pengangguran, terutama selama periode resesi atau perlambatan ekonomi. Efektivitas tersebut tercermin melalui peningkatan belanja pemerintah, pemberian insentif pajak, serta program bantuan sosial yang bertujuan mendorong permintaan agregat dan memperluas kesempatan kerja. Sementara, penelitian Songur et.al (2023) menegaskan bahwa masalah pengangguran di Turki lebih banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor struktural, seperti keterbatasan sektor swasta, tingginya jumlah penduduk usia muda, dan ketidaksesuaian keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan produksi. Oleh karena itu, peningkatan belanja pemerintah saja tidak cukup untuk mengurangi pengangguran.

Nkechi et.al (2026) mengatakan bahwa efektivitas kebijakan moneter dalam mempengaruhi perekonomian Nigeria bergantung pada kombinasi instrumen yang digunakan dan kondisi struktural ekonomi. Penerapan suku bunga yang seimbang,

pengendalian inflasi yang efektif, stabilitas nilai tukar, serta reformasi fiskal dan struktural diperlukan untuk mendukung penurunan tingkat pengangguran. Sementara, penelitian Bennani (2023) pada Amerika Serikat dan Jerman menunjukkan bahwa pengaruh kebijakan moneter terhadap tingkat pengangguran bersifat heterogen. Perbedaan dampak tersebut dipengaruhi oleh karakteristik demografis dan kondisi kelompok pekerja dalam pasar tenaga kerja. Studi Aladejana et.al (2024) mengindikasikan bahwa kebijakan moneter belum berperan secara efektif dalam menurunkan tingkat pengangguran di Nigeria, sehingga kontribusinya terhadap upaya pengurangan pengangguran masih terbatas. Sedangkan penelitian Ali et.al (2021) kebijakan moneter di Pakistan cenderung efektif dalam mendukung pengurangan pengangguran. Peningkatan penyaluran kredit kepada sektor swasta mampu mendorong investasi dan aktivitas produksi, yang pada akhirnya meningkatkan penciptaan lapangan kerja serta mengurangi tingkat pengangguran.

Olurinola dan Egbe (2024) menyatakan bahwa efektivitas kebijakan moneter dalam mempengaruhi tingkat pengangguran lebih konsisten dibandingkan kebijakan fiskal. Penerapan kebijakan fiskal dan moneter secara terkoordinasi mampu memperkuat upaya pengurangan pengangguran di Nigeria. Sedangkan penelitian Nosike dan Ojobor (2024) menunjukkan bahwa Kebijakan fiskal mendorong permintaan agregat dan penciptaan lapangan kerja, sedangkan kebijakan moneter mendukung investasi dan aktivitas ekonomi melalui pengaturan suku bunga serta likuiditas. Sinergi kedua kebijakan tersebut dapat meningkatkan efektivitas dalam menjaga stabilitas ekonomi dan menurunkan tingkat pengangguran.

Penelitian terdahulu mengenai pengaruh kebijakan fiskal dan kebijakan moneter terhadap tingkat pengangguran masih menunjukkan temuan yang berbeda. Sejumlah

penelitian menemukan bahwa instrumen kebijakan fiskal maupun kebijakan moneter mampu menurunkan tingkat pengangguran, sedangkan penelitian lainnya menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan bahkan berlawanan. Perbedaan hasil tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan tingkat pengangguran belum memiliki kesimpulan yang sama, terutama pada negara berkembang yang memiliki karakteristik ekonomi dan mekanisme transmisi kebijakan moneter yang berbeda. Pengaruh kedua kebijakan tersebut umumnya masih dianalisis secara langsung terhadap tingkat pengangguran, sementara Kurva *Phillips modern* menjelaskan bahwa ketika inflasi meningkat, bank sentral akan merespons melalui kenaikan suku bunga untuk mengendalikan tekanan inflasi. Kenaikan suku bunga meningkatkan biaya pinjaman, mengurangi konsumsi dan investasi, menurunkan aktivitas produksi, serta mendorong peningkatan tingkat pengangguran. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengaruh inflasi terhadap tingkat pengangguran dapat berubah setelah adanya respons kebijakan moneter melalui perubahan suku bunga. Penelitian ini menggunakan interaksi antara suku bunga dan inflasi untuk menganalisis apakah perubahan suku bunga mengubah pengaruh inflasi terhadap tingkat pengangguran dengan menggunakan data panel 45 negara berkembang yang terdiri atas negara berpendapatan rendah, menengah bawah, dan menengah atas (World Bank, 2026). Penelitian juga menggunakan periode 2015-2024 yang mencakup berbagai perubahan kondisi ekonomi global, seperti perlambatan ekonomi dunia, pandemi COVID-19, masa pemulihan ekonomi, dan pengetatan kebijakan moneter di berbagai negara.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka penelitian menyusun rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah kebijakan fiskal dan moneter dapat mengurangi tingkat pengangguran di negara berkembang?
2. Apakah adanya inflasi memperkuat instrumen kebijakan moneter atau memperlemah terhadap tingkat pengangguran di negara berkembang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah, maka penelitian memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pengaruh kebijakan fiskal dan moneter terhadap tingkat pengangguran di negara berkembang.
2. Untuk mengetahui peran inflasi dalam memperkuat atau memperlemah instrumen kebijakan moneter terhadap tingkat pengangguran di negara berkembang.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam studi dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur ekonomi makro yang membahas hubungan antara kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan tingkat pengangguran. Kajian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran inflasi dalam mempengaruhi kebijakan moneter dengan tingkat pengangguran di negara berkembang.

2. Manfaat secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi tambahan bagi pemerintah serta otoritas moneter dalam menyusun kebijakan yang mendukung peningkatan kesempatan kerja. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai dasar evaluasi efektivitas kebijakan fiskal dan kebijakan moneter dalam menghadapi berbagai dinamika perekonomian di negara berkembang.